

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada Dinas dan Badan Pemerintah Kota Lhokseumawe)

Neo Agustina¹, Mulia Andirfa², Maryana³ dan Zulkaisih⁴

^{1,2,3,4}STIE Lhokseumawe

Neo.a@stie-lhokseumawe.ac.id¹, andirfa@stie-lhokseumawe.ac.id²,
maryana@stie-lhokseumawe.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to examine the Effect of Implementation of Accounting Standards Based on Accrual Government Transparency of Financial Statements (Case Study on Lhokseumawe City Government Agency). The data used in this research is primary data of 84 samples with purposive sampling technique. The method used to analyze between independent variable with dependent variable is simple linear regression method and classical assumption test. The result of the research is partial, the application of accrual accounting standard has a significant effect on the transparency of financial report on Lhokseumawe Government Agency.

Keywords: the adoption of accrual accounting standards and the transparency of financial statements

A. Latar Belakang

Pelaporan keuangan merupakan media komunikasi penting bagi organisasi sektor publik khususnya pemerintah. Laporan keuangan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban atas anggaran dan pengalokasian sumber daya yang digunakan (Damayanti, 2012).

Peranan laporan keuangan sebagai alat akuntabilitas kepada publik telah mendorong pemerintah untuk senantiasa secara konsisten memberikan informasi akuntabilitas keuangan yang transparan dan dapat dipercaya. Transparansi dan kualitas anggaran pemerintah berperan vital sebagai upaya untuk membangun kualitas demokrasi dan pemerintahan yang efektif (Harun, 2012).

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat secara tidak proporsional (Harun, 2012).

Menurut Meutia (2002), transparansi yaitu adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009), transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Laporan keuangan sebagai alat akuntabilitas publik berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan (Mardiasmo, 2009). Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Mardiasmo, 2009).

Menurut Fakhurrazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders. West & Carnegie, (2005) mengatakan bahwa perubahan standar akuntansi pada sektor publik ke basis akrual dilatarbelakangi dengan tingginya peningkatan kebutuhan akan akuntabilitas pada institusi sektor publik terutama instansi Pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Gupta, (2009) menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara transparansi dan akuntabilitas dalam mengadopsi penganggaran berbasis akrual bila dibandingkan dengan anggaran berbasis kas. Hal ini juga menjelaskan bahwa penganggaran dengan berbasis akrual adalah solusi terbaik untuk mengakomodasi efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Adanya Peraturan Pemerintah mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual ini, selanjutnya Komite Standar Akuntansi Publik (KSAP) bertanggung jawab di dalam mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan amanat Undang-undang No. 1 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dan Permendagri No. 64 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Perubahan ini pasti akan memberikan tantangan bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang merupakan salah satu kabupaten/kota yang berada di Pemerintah Aceh untuk mengaplikasikannya apalagi dalam praktiknya pengelolaan keuangan yang digunakan sejak dahulu adalah *single entry*. SAP mengisyaratkan pencatatan *double entry* yang jelas jauh berbeda dengan *single entry*. Selain itu SAP secara bertahap akan berubah dari *cash toward accrual* (PP 24 tahun 2005) ke *full accrual* (PP 71 tahun 2010).

Menurut Simanjuntak, (2010) basis akrual adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Jadi penerapan basis akrual dinilai sangat sesuai karena pencatatan dicatat saat terjadinya arus sumber daya. Basis akrual juga menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro dan menyediakan informasi komprehensif. Implikasi penerapan akuntansi berbasis akrual pada entitas pemerintahan bukanlah perkara mudah. Mengingat banyaknya pro dan kontra dari kelebihan dan kekurangan basis akrual itu sendiri. Untuk itu diperlukan persiapan dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh entitas pemerintahan dalam mengemban amanat dari undang-undang. Konsep basis akrual ini relevan dengan riset yang akan dilakukan lembaga

pada entitas pemerintahan yang telah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintahnya.

B. Landasan Teori

1. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Peraturan turunan dari PP 71/2010 ini baru dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan terbitnya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib untuk menerapkan SAP.

Para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah membutuhkan informasi untuk mengelola organisasi yang dijalankannya. Selain sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, informasi juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi terhadap pihak lain (Siregar, 2001). Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi di bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas.

Dengan ditetapkannya PP SAP, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Wijaya (2008), standar akuntansi pemerintahan merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Menurut Sinaga (2005) SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

2. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Fakhurrazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya

adalah keseimbangan antar generasi, dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat memertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

Menurut Nordiawan (2006), beberapa upaya untuk membuat sebuah standar yang relevan dengan praktik-praktik akuntansi di organisasi sektor publik telah dilakukan dengan baik oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) maupun oleh pemerintah sendiri. Mahsun (2007) menyebutkan di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan organisasi-organisasi massa. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, merupakan bagian dari organisasi sektor publik, sehingga diperlukan juga standar akuntansi tersendiri.

3. Pengertian Akuntansi Berbasis Akrual

Akuntansi akrual mengakui dan mencatat transaksi dan kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Akuntansi akrual sebagai metodologi dalam akuntansi dimana transaksi diakui berdasarkan aktivitas ekonomi bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Mengikuti metode ini, maka pendapatan akan diterima ketika pekerjaan telah diselesaikan dan beban akan diakui sebagai utang ketika sumber daya telah digunakan (Bastian, 2006).

Menurut Simanjuntak, (2010) basis akrual adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Jadi penerapan basis akrual dinilai sangat sesuai karena pencatatan dicatat saat terjadinya arus sumber daya. Basis akrual juga menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro dan menyediakan informasi komprehensif.

Menurut IFAC, (2003) *International Federation of Accountants* (IFAC) dalam *Public Committee Study Nomor 14 tentang Transition to The Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Governments Entities (second edition)* kelebihan dalam penerapan basis akrual pada akuntansi sektor publik atau pemerintahan yaitu:

1. Memberikan gambaran bagaimana pemerintah mendanai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan pendanaannya.
2. Memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk melihat kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas- aktivitasnya dan untuk memenuhi segala kewajiban dan komitmen-komitmen yang ada.
3. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah atau instansi dan perubahan posisi keuangannya.
4. Menyediakan ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya.
5. Memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil akhir penggunaan sumber daya yang dikelolanya.
6. Memberikan ruang yang lebih luas dalam hal profesional judgements baik oleh penyedia laporan keuangan (entitas pelaporan/entitas akuntansi) maupun auditor pemerintah.

4. Kelebihan dan Kekurangan Akuntansi Berbasis Akrua

Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas Mardiasmo (2009). Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Menurut Bastian (2006), keuntungan basis akrual dapat diperinci sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh.
 2. Basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima.
 3. Basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal. Di samping itu, basis akrual digunakan untuk mencatat revenue ketika diperoleh dan biaya pada saat terjadi. Dengan kata lain, biaya dicatat ketika utang tanpa memandang kapan pembayaran dilakukan.
- Dari beberapa uraian diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa basis akrual akan mengakui transaksi ekonomi tidak didasarkan diterima atau dikeluarkannya uang tetapi ketika terjadi perubahan posisi keuangan perusahaan yang ditandai dengan adanya aliran masuk atau keluar manfaat ekonomi.

5. Kendala Akuntansi Berbasis Akrua

Menurut Widjajerso (2010) permasalahan yang mungkin timbul dari penerapan basis akuntansi pada akuntansi pemerintah Indonesia dapat mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan perancangan akuntansi berbasis akrual
Pendekatan ini dirasa paling masuk akal, mengingat konsep akuntansi berbasis akrual harus dipandang sebagai bagian dari sebuah reformasi sistem keuangan negara secara keseluruhan yang harus mencakup reformasi di bidang lain selain hanya masalah akuntansi. Pendekatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan hasil optimal karena pelaporan akuntansi dan keuangan berbasis akrual dirancang secara bersamaan dengan pelaporan berbasis kas, kondisi yang saat ini berlaku. Namun demikian, untuk menghindari hilangnya momentum perubahan menuju basis akrual, langkah total juga disarankan jika kendala-kendala penerapan basis akrual dapat diatasi.
2. Jenis laporan keuangan.
Permasalahan lain adalah jenis-jenis laporan keuangan yang harus disusun oleh sebuah entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Secara peraturan undang-undang keuangan negara dan undang-undang perbendaharaan, memang hanya mensyaratkan adanya empat laporan keuangan yakni laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Di satu pihak, KSAP saat ini telah mengantisipasi jenis laporan tambahan selain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan dengan menambahkan tiga jenis laporan baru yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas, seperti tercantum dalam konsep publikasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Di lain pihak, penyusun laporan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sepertinya masih menunggu hasil KSAP, meskipun sudah terlihat aktif dalam berbagai forum seperti limited hearing dan diskusi-diskusi basis akrual.
3. Pengakuan pendapatan
Jika basis akrual diterapkan, pendapatan diakui pada saat timbul hak dari pemerintah. Masalahnya adalah dalam hak pajak yang menganut *self assessment* di mana wajib pajak menghitung sendiri kewajibannya, hak tersebut menjadi belum final

karena masih dimungkinkan adanya restitusi meskipun sudah ada SPT, sehingga dokumen yang dijadikan dasar penentuan hak tagih pajak menjadi masalah. Pendapatan harus diakui jika telah muncul hak sehingga pencatatan pendapatan dilakukan setiap kali ada transaksi munculnya hak tersebut. Standar akuntansi pemerintah nantinya harus menciptakan kriteria yang jelas atas pengakuan pendapatan tersebut.

4. Pengakuan belanja/beban

Jika basis akrual diterapkan, penggunaan istilah belanja menjadi tidak tepat, sehingga terminologi belanja seharusnya diganti dengan beban atau biaya. Untuk laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, terminologi belanja sudah tepat dan hal ini juga sesuai dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan untuk laporan lain, yakni, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas, terminologi beban atau biaya harus menggantikan terminologi belanja. Dengan demikian, biaya non kas seperti biaya depresiasi akan tercantum dalam laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca, karena tidak ada arus kas keluar seperti pada belanja.

6. Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat secara tidak proporsional.

Mardiasmo (2009) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan efektifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Menurut Adrianto (2008) transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan member tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasilhasil yang dicapai. Menurut Meutia (2002), transparansi yaitu adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009), transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

7. Indikator Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihakpihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Garini (2011) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat

kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan rakyat.

Indikator-indikator dari transparansi menurut Arliana (2011) adalah sebagai berikut:

1. Adanya penyediaan informasi yang jelas, terbuka, jujur tentang tanggungjawab.
2. Adanya mekanisme sistem pengaduan jika terdapat peraturan yang dilanggar.
3. Kemudahan dalam mengakses informasi.
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga non publik dan media massa sebagai sarana untuk meningkatkan arus informasi.

Perangkat pendukung transparansi digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan dari aspek tranparansi yang berkaitan dengan kepentingan dalam pelaporan keuangan yaitu untuk menciptakan kepercayaan dan hubungan timbal balik antara sektor publik yaitu Pemerintah selaku entitas pemerintahan dengan masyarakat. Implementasi transparansi ditujukan untuk membangun keyakinan publik kepada instansi-instansi pemerintah (sektor publik) adalah satuan kerja perangkat daerah yang bersih dan professional dalam melakukan tugasnya (Garini, 2011).

C. Metode Penelitian

1. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)

Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dengan melakukan :

a. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan mencermati dokumendokumen yang ada. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan keyakinan bahwa data yang diperoleh sebelumnya adalah benar dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai kegiatan yang dilaksanakan.

b. Angket/*Kuesioner*

Angket/kuesioner dalam penelitian adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi 2006). Angket tersebut berupa daftar *check list* yaitu berisi butir-butir pertanyaan yang terdiri dari lima pilihan jawaban atau sering disebut dengan skala likert.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori guna mendukung data primer yang diperoleh selama penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku serta referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi akrual dan transparansi laporan keuangan. Pada umumnya variabel penelitian dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*).

1. Variabel Bebas atau *Independent Variable* (X)

Variabel bebas atau *independent variable* (X) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependen* (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Penerapan Standar Akuntansi Akrual (X).

2. Variabel Terikat atau *Dependent Variable* (Y)

Variable terikat atau *dependent variable* (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Transparansi Laporan Keuangan (Y).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Persamaan regresi sederhana yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan (Sugiyono, 2011) adalah sebagai berikut:

$$y = a + \beta x + \varepsilon$$

Keterangan: a = konstanta

β = koefisien regresi

y = Variabel dependen (variabel terikat)

x = Variabel independen (variabel bebas)

ε = *error term*

D. Pembahasan

Penerapan Standar Akuntansi Akruwal memiliki tingkat signifikansi, yaitu 0,00 lebih kecil dibandingkan nilai tingkat signifikansi α (0,05). dan menghasilkan t hitung sebesar 10,881 dan t tabel sebesar 1,664 yang berarti t hitung lebih besar dari t tabel ($10,881 > 1,664$) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Akruwal berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dianne Natalia Christanti (2015) yaitu dari hasil penelitian, secara parsial maupun simultan disimpulkan bahwa akuntansi berbasis akruwal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan survey pada Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ida Najati (2016) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi akuntansi berbasis akruwal mempunyai implikasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga. Hal ini disebabkan karena dengan basis akruwal, informasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga akan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruwal terhadap transparansi laporan keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruwal berpengaruh signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

F. Daftar Pustaka

- Adrianto Sugiarto. 2008. Hubungan Kepemimpinan dengan Kesiapan Implementasi Knowledge Management dalam Organisasi. Jurnal Universitas Sumatra Utara.
- Damayanti dan Herawati, N. 2012. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung). e-journal S1 Universitas Pendidikan Ganesha, 1-10.
- Gupta J. P. 2009. Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan, dan Pelatihan Terhadap Penyusunan laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar. Medan: Universitas Sumatra Utara.

- Garini. 2011. *Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas di Kota Bandung secara parsial dan simultan*. Universitas Komputer Indonesia Bandung.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harun, H. and Kamase. 2012. *Accounting Change and Institutional Capacity: The Case of a Provincial Government in Indonesia*, *Australasian Accounting Business and Finance Journal*, 6(2), 35–50.
- Harun, H, 2012. *Public Sector Accounting Reforms in the Indonesian PostSuharto Era*, Thesis, The University of Waikato.
- Mahsun Mohammad dan Firma Sulistyowati, 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Meutia Harun. 2002. *Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD terhadap Standar Akuntansi Berbasis AkruaI (kasus di Kota Surakarta)*. Simposium Nasional Akuntansi XVI, 1-37.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Nordiawan Deddi, Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Satmoko, Nofan. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sektor Publik*. April 2012.
- Sinaga, Jamason. 2005. *Selamat Datang Standar Akuntansi pemerintahan*. Jakarta.
- Siregar, Baldric dan Siregar Bonni. 2001. *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, Henryanto. 2008. *Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24 Tahun 2005) Untuk Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan dan Akuntabel*. *Jurnal Akuntansi/Tahun XII No.3*. 313
- West dan Carnegie, 2005. *Independent financial auditing and the crusade against government sector financial and management Ghana*, *Qualitative*. No.6(4),224